



**POTRET MULTIFUNGSI HUTAN DI KABUPATEN JEMBER : DINAMIKA,  
TANTANGAN, DAN STRATEGI PENGELOLAAN BERKELANJUTAN  
TAHUN 2024**

**PORTRAIT OF MULTIFUNCTIONAL FORESTS IN JEMBER DISTRICT:  
DYNAMICS, CHALLENGES AND SUSTAINABLE MANAGEMENT  
STRATEGIES IN 2024**

**Anggraini Ratih Purwandari<sup>1\*</sup>, Agung Herdianto<sup>2</sup>**

*\*) Corresponding Author*

<sup>1,2</sup>Universitas PGRI Argopuro Jember

\*Email: [anggiratih9@gmail.com](mailto:anggiratih9@gmail.com)

**ABSTRAK**

Hutan memiliki peran multifungsi sebagai aset ekologi, ekonomi, dan sosial. Di Kabupaten Jember, Jawa Timur, hutan menghadapi dinamika dan tantangan kompleks, termasuk deforestasi, perubahan penggunaan lahan, dan konflik antara konservasi dengan mata pencaharian masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi terkini hutan di Kabupaten Jember, mengidentifikasi tantangan utama, dan mengusulkan strategi pengelolaan berkelanjutan untuk tahun 2024. Dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini menyoroti pentingnya kolaborasi pemangku kepentingan, penguatan kebijakan, dan pendekatan konservasi inovatif untuk memastikan multifungsi hutan dalam jangka panjang. Temuan penelitian menekankan bahwa untuk mengatasi tantangan ini diperlukan keseimbangan antara pelestarian ekologi dan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat setempat.

**Kata Kunci :** Dinamika, Hutan, Potret, Strategi, Tantangan.

**ABSTRACT**

Forests play a multifunctional role as ecological, economic, and social assets. In Jember Regency, East Java, forests face complex dynamics and challenges, including deforestation, land-use changes, and conflicts between conservation and community livelihoods. This study aims to analyze the current state of forests in Jember Regency, identify key challenges, and propose sustainable management strategies for 2024. Using qualitative and quantitative methods, this research highlights the importance of integrating stakeholder collaboration, policy reinforcement, and innovative conservation approaches to ensure the forests' long-term multifunctionality. The findings emphasize that addressing these challenges requires a balance between ecological preservation and socio-economic benefits for local communities.

**Keywords :** Dynamics, Forest, Portrait, Strategy, Challenge.

**PENDAHULUAN**

Kabupaten Jember, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, memiliki kekayaan alam yang melimpah, termasuk luasan hutan yang signifikan. Hutan di Kabupaten Jember memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menyediakan habitat bagi

berbagai flora dan fauna, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat.

Hutan merupakan wilayah yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan yang lebat yang terdiri atas tumbuh-tumbuhan tingkat tinggi, semak, paku-pakuan, rumput, jamur, binatang liar, serta makhluk hidup lainnya yang memiliki tempat tinggal didalamnya. Hutan terdiri atas beberapa unsur udara, air, dan tanah. Keberadaan hutan membuat wilayah tampak sejuk, tentram, dan damai. Hutan sebagai ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, dimana makhluk hidup saling membutuhkan satu sama lain dan terjadi rantai makanan dan memiliki kandungan oksigen yang dipergunakan untuk bernafas bagi setiap makhluk hidup. Namun, di tahun-tahun ini hutan menjadi langka akibat ulah manusia. Hutan-hutan di musnahkan dan dibangun pabrik-pabrik untuk kehidupan manusia. Padahal hutan merupakan sumber kehidupan bagi setiap makhluk hidup (Arif, 2016).

Hutan merupakan sumberdaya alam yang memiliki nilai ekologi, sosial dan ekonomi yang tinggi (Hutan et al., 2023). Hutan juga memiliki fungsi sebagai paru-paru dunia dan sistem penyangga kehidupan sehingga kelestariannya harus dijaga dan dipertahankan dengan pembangunan hutan yang tepat. Berdasarkan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999, pembagian hutan di Indonesia berdasarkan fungsinya adalah hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi (Sidik, 2020).

Hutan di Kabupaten Jember terbagi dalam 3 kategori utama berdasarkan fungsinya:

#### 1. Hutan Lindung

Hutan lindung di Kabupaten Jember memiliki peran utama dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Wilayah ini melindungi sumber daya air dan mencegah erosi tanah, terutama di kawasan pegunungan seperti Gunung Argopuro.

#### 2. Hutan Konservasi

Hutan Konservasi di Kabupaten Jember, seperti Kawasan Suaka Margasatwa Meru Betiri, merupakan habitat bagi berbagai flora dan fauna yang dilindungi. Kawasan ini menjadi pusat keanekaragaman hayati yang mendukung penelitian serta pariwisata berbasis ekologi.

#### 3. Hutan Produksi

Hutan produksi digunakan untuk kegiatan ekonomi seperti penebangan kayu legal, produksi karet dan pengembangan argoforestri. Kawasan ini memberikan kontribusi ekonomi signifikan bagi masyarakat sekitar melalui sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Pada tahun 2024, beberapa perubahan signifikan terjadi dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan di Kabupaten Jember yang disebabkan oleh peningkatan peran ekonomi hutan yaitu hutan produksi memberikan kontribusi ekonomi yang terus meningkat, terutama

melalui hasil hutan non kayu seperti madu dan hasil agroforestri. Selain itu dengan adanya pengembangan ekowisata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menarik perhatian wisatawan lokal dan internasional. Hal ini mendorong pengelolaan yang lebih inklusif dan partisipatif. Dinamika ini juga memunculkan tantangan serius, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi.

Salah satu permasalahan yang timbul dalam pembangunan kehutanan adalah kerusakan hutan sebagai akibat dari kesalahan dalam pengelolaan dan maraknya kegiatan di luar sektor kehutanan yang menggunakan lahan hutan. Seiring perkembangannya, keberadaan hutan terus mengalami penurunan baik itu dalam hal kuantitas maupun kualitasnya melalui proses degradasi hutan dan deforestasi (Dariono et al., 2018).

Salah satu penyebab kerusakan hutan adalah deforestasi. Deforestasi mengurangi sumber plasma nutfah yang ada di dalam hutan. Oleh karena itu, analisis spasial terhadap luasan hutan di Kabupaten Jember menjadi suatu kajian yang esensial untuk memahami dinamika dan keberlanjutan ekosistem hutan dalam konteks geografis.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis spasial terhadap luasan hutan di Kabupaten Jember. Dengan menggunakan metode analisis spasial, kita dapat mengidentifikasi perubahan luasan hutan, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perubahan tersebut, dan merumuskan strategi keberlanjutan untuk pengelolaan hutan yang lebih baik.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif (*mix methods*). Metode kualitatif dengan analisis dokumen yang berupa kebijakan, peraturan dan laporan terkait pengelolaan hutan dan observasi lapangan. Sedangkan metode kuantitatif dengan analisis data spasial menggunakan GIS (*Geographic Information System*) tentang tutupan lahan dan distribusi kawasan hutan yang dipadukan dengan pemetaan partisipatif.

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian secara administrasi berada Di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan yaitu dari bulan Juli sampai Agustus 2024.

### **Alat-Alat dan Bahan Penelitian**

Adapun alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu laptop dan Personal computer. Bahan dalam penelitian ini adalah peta rupa bumi skala 1 : 300.000, pengolah data berupa software ArcGIS 10.8, data kawasan hutan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, Microsoft Excel dan Microsoft Word.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian mencakup pengumpulan data sekunder meliputi data luasan hutan KLHK tahun 2024 dan juga data administrasi Provinsi Jawa Timur.

### **Analisis Luasan Hutan Berdasarkan Fungsinya**

Langkah pertama yang dilakukan dalam menganalisis data spasial yakni mengoreksi data Rupa Bumi Indonesia Provinsi Jawa Timur dengan melakukan klasifikasi data administrasi kabupaten dan kota. Selanjutnya dilakukan Teknik Tumpang Tindih (*overlay*) dari data spasial administrasi Kabupaten Jember dengan data kawasan hutan tahun 2024. Data kawasan hutan diperoleh dengan melakukan teknik digitasi dan perhitungan luas kawasan hutan menggunakan proyeksi *Cylindrical Equal Area*. Dari hasil analisis teknik tersebut maka diperoleh pembagian klasifikasi fungsi hutan, adapun kelas klasifikasi tersebut adalah : 1). Hutan Lindung, 2). Hutan Produksi, 3). Hutan Konservasi dan 4). Area penggunaan lain.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisa Perubahan Tutupan Hutan**

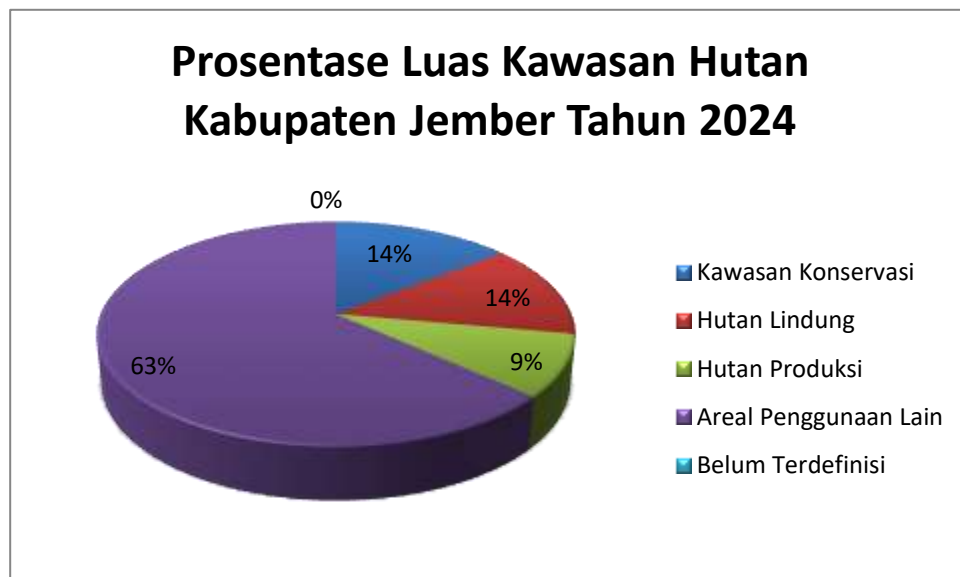
Analisa tutupan luasan hutan di Kabupaten Jember menunjukkan total keseluruhan luas kawasan adalah 331.348,61 Ha. Sedangkan rincian luasan hutan berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi kawasan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Untuk kawasan konservasi dengan luas total sekitar 47.383,09 Ha (gabungan dari tiga sub kategori dan kawasan konservasi laut), untuk hutan lindung luasnya mencapai 44.892,78 Ha, dan untuk hutan produksi luas kawasannya mencapai 29.385,65 Ha. Sementara itu untuk Areal Penggunaan Lain (APL) memiliki daerah terluas dari total luas kawasan dengan luas sekitar 209.682,84 Ha menunjukkan bahwa adanya tekanan terhadap fungsi kawasan hutan. Area yang belum terdefinisi sebesar 1.49 Ha. Untuk melihat perbedaan luasan hutan dengan jelas dapat dilihat dari Tabel 1. berikut :

**Tabel 1.** Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Jember Tahun 2024

| No.          | Fungsi Kawasan Hutan  | No. SK PNJK        | Luas (Ha)     | Presentase (%) |
|--------------|-----------------------|--------------------|---------------|----------------|
| 1.           | Kawasan Konservasi    | 395/Menhut-II/2011 | 47.383,09 Ha  | 14             |
| 2.           | Hutan Lindung         | 395/Menhut-II/2011 | 44.892,78 Ha  | 14             |
| 3.           | Hutan Produksi        | 395/Menhut-II/2011 | 29.385,65 Ha  | 9              |
| 4.           | Areal Penggunaan Lain | 395/Menhut-II/2011 | 209.682,84 Ha | 63             |
| 5.           | Belum Terdefinisi     | 395/Menhut-II/2011 | 1.49 Ha       | 0              |
| <b>Total</b> |                       |                    | 331.348,61 Ha | 100            |

Sumber : <https://sigap.menlhk.go.id/>

Proporsi kawasan hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi menyumbang 37 % dari total wilayah, dengan hutan konservasi memiliki proporsi terbesar di antara kategori hutan. Areal penggunaan lain (APL) mendominasi penggunaan lahan dengan hampir 63 %, menunjukkan tekanan pada kawasan hutan untuk aktivitas lain seperti pertanian, pemukiman, atau perkebunan (Gambar 1.).

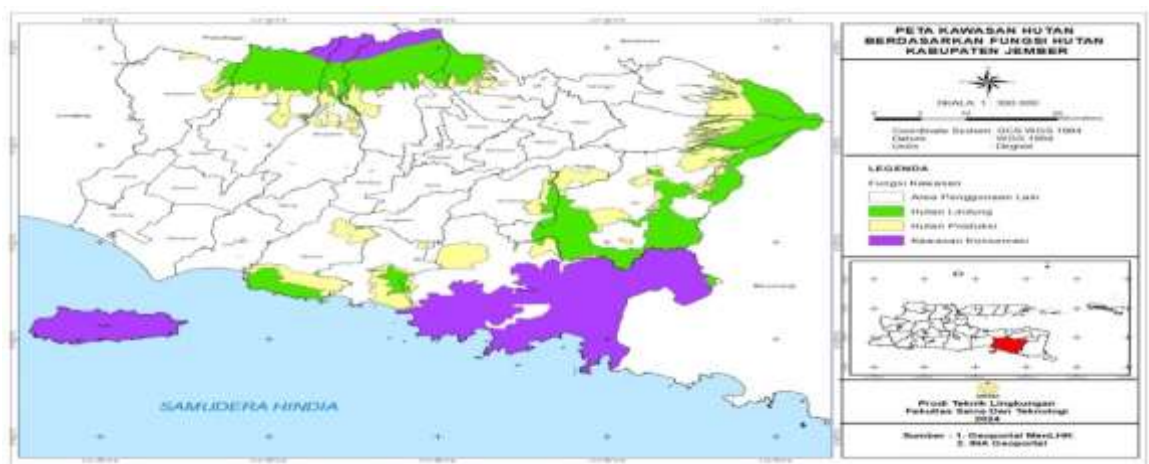
**Gambar 1.** Prosentase Luas Kawasan Hutan Kabupaten Jember Tahun 2024

Luasan hutan lindung lebih rendah dari APL, menimbulkan resiko kehilangan fungsi ekologis seperti perlindungan keanekaragaman hayati dan penyangga bencana alam. Luasan hutan produksi meskipun jumlahnya signifikan perlu dikelola secara berkelanjutan untuk menghindari degradasi lahan akibat eksploitasi berlebihan.

Berdasarkan Tabel 1. juga terdapat area kecil yang belum jelas peruntukannya, berpotensi menjadi peluang atau tantangan dalam pengelolaan wilayah. Peluang yang diberikan dengan memanfaatkan APL ini untuk program agroforestri atau ekowisata yang melibatkan masyarakat lokal. Sedangkan untuk tantangan kedepannya adalah memastikan kawasan yang belum terdefinisi memiliki rencana tata ruang yang jelas dan mendukung fungsi ekologis. Hal lainnya yang diperlukan dalam menghadapi tantangan tersebut adalah meningkatkan pemetaan dan pemantauan kondisi hutan berdasarkan data spasial yang telah terperinci. Dengan mengimplementasikan strategi ini, Kabupaten Jember dapat menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan di tahun 2024.

APL memiliki luasan terbesar dibandingkan fungsi kawasan hutan lainnya, yaitu 209.682,84 Ha atau sekitar 63 % dari total kawasan, menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Jember dimanfaatkan untuk kebutuhan non hutan. APL ini juga tersebar di hampir seluruh wilayah Jember, terutama di sekitar daerah dataran rendah dan area dengan aksesibilitas tinggi. Wilayah APL cenderung mendominasi bagian tengah hingga barat daya Kabupaten, sesuai dengan pola tata guna lahan untuk pemukiman, pertanian dan perkebunan (Gambar 2.). APL umumnya digunakan untuk kegiatan non konservasi seperti pertanian (tanaman pangan, perkebunan tebu dan kopi), pemukiman penduduk, dan infrastruktur umum ( jalan, fasilitas pendidikan, kesehatan dan perdagangan).

Potensi pengembangan APL ini adalah mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui agribisnis, industri kecil dan pengembangan infrastruktur. Sementara tantangan pengembangan APL ini adalah tekanan terhadap kawasan hutan akibat ekspansi APL untuk pemukiman dan lahan produksi dan juga resiko degradasi lingkungan seperti erosi, banjir, dan kekeringan jika pengelolaan APL tidak dilakukan secara berkelanjutan.



**Gambar 2.** Peta Kawasan Hutan Kabupaten Jember Berdasarkan Fungsinya Pada Tahun 2024

## **Dinamika Tutupan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di Kabupaten Jember**

### **a. Kawasan Konservasi**

Kawasan Konservasi (47.383,09 Ha / 14,3%). Kawasan ini mempunyai peranan melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem. Dinamika utama mencakup upaya pelestarian yang harus diseimbangkan dengan tekanan dari aktivitas manusia seperti perambahan hutan, eksplorasi sumber daya alam, atau konversi lahan. Ketidakseimbangan ini seringkali terjadi karena perbedaan yang signifikan antara kepentingan konservasi dengan kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar .

Disamping konflik kepentingan yang menggerus kawasan konservasi terjadi juga penurunan kualitas ekosistem kawasan konservasi. Kerusakan habitat akibat pembukaan lahan, penebangan liar, dan perubahan penggunaan lahan mengancam terhadap penurunan keanekaragaman hayati seperti penurunan populasi spesies langka dan terganggunya fungsi ekologis kawasan (Dunggio et al., 2022).

Dinamika lainnya berhubungan dengan kurangnya edukasi dan kesadaran lingkungan bagi masyarakat lokal. Banyak masyarakat lokal yang belum memahami pentingnya kawasan konservasi untuk keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan jangka panjang. Hal ini masih diperparah dengan perilaku tidak ramah lingkungan seperti pembakaran hutan atau penangkapan satwa dilindungi masih seringkali terjadi.

Tekanan dari pembangunan wilayah juga mampu memberikan warna terhadap dinamika yang ada. Peningkatan pembangunan infrastruktur, seperti jalan atau pemukiman baru juga mengancam integritas kawasan konservasi. Jika diurai lebih lanjut terjadi fragmentasi habitat dan konflik kepentingan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan (Juniyanti et al., 2020).

### **b. Kawasan Hutan Lindung**

Hutan Lindung (44.892,78 Ha / 13,6%). Berperan dalam perlindungan lingkungan, terutama untuk mencegah erosi, menjaga tata air, dan melindungi sumber daya air. Dinamika yang dihadapi adalah ancaman kerusakan akibat konversi dan perambahan lahan, penebangan liar (*Illegal logging*), konflik kepentingan, bencana alam dan kurangnya kesadaran masyarakat atau edukasi.

Hutan lindung di Jember, seperti kawasan hutan di lereng Gunung Argopuro dan Gunung Raung menghadapi perambahan untuk pertanian, perkebunan dan pemukiman. Permasalahan yang ditimbulkan adalah penurunan luas tutupan hutan yang berdampak pada ekosistem dan fungsi hidrologis kawasan. Aktivitas penebangan liar masih terjadi akibat lemahnya

pengawasan dan tingginya permintaan kayu. Hal ini menimbulkan kerusakan ekosistem hutan, hilangnya keanekaragaman hayati dan potensi banjir atau longsor (Wahyuni & Suranto, 2021).

Permasalahan lainnya yang tidak kalah peliknya adalah masyarakat lokal sering kali memanfaatkan hutan lindung untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti kayu bakar dan lahan pertanian. Permasalahan ini menyebabkan konflik antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan upaya pelestarian kawasan hutan.

Dinamika lainnya adalah kerusakan ekosistem akibat bencana alam, hal ini dapat diketahui dari data beberapa kawasan hutan lindung rentan terhadap kerusakan akibat bencana seperti kebakaran hutan dan tanah longsor. Bencana ini memperparah degradasi kawasan hutan dan mempersulit proses pemulihan.

Pemahaman masyarakat mengenai pentingnya hutan lindung untuk keberlanjutan ekosistem juga tergolong masih rendah. Salah satunya dapat dilihat dari perilaku eksploitasi hutan terus berlangsung tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang dari *over* eksploitasi.

### **c. Hutan Produksi**

Hutan Produksi (29.385,65 Ha / 8,9%). Fungsi utamanya adalah pemanfaatan hasil hutan (seperti kayu dan non-kayu). Dinamika utama yang dihadapi adalah eksploitasi berlebihan, konflik pengelolaan dengan masyarakat lokal, minimnya diversifikasi pemanfaatan hutan, kurangnya rehabilitasi dan pemeliharaan, dampak perubahan iklim dan bencana alam serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan.

Kawasan hutan produksi di Kabupaten Jember sering menghadapi tekanan akibat penebangan yang tidak terkendali, baik untuk kayu legal maupun ilegal. Dampaknya adalah penurunan produktivitas hutan, degradasi lahan, dan kerusakan ekosistem hutan.

Sebagian masyarakat memanfaatkan kawasan hutan produksi untuk kegiatan pertanian dan pemukiman tanpa izin. Seringkali terjadi konflik penggunaan lahan antara pengelola resmi (Perhutani, swasta) dengan masyarakat lokal.

Selain ancaman yang sudah disebutkan diatas, pemanfaatan hutan produksi masih terfokus pada hasil kayu, sementara potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) kurang dimanfaatkan. Padahal sebenarnya ketergantungan pada komoditas kayu meningkatkan resiko kerusakan hutan akibat eksploitasi berlebih.

Disamping itu lahan kritis di kawasan hutan produksi sering tidak direhabilitasi dengan optimal, baik itu karena keterbatasan anggaran maupun pengelolaan yang kurang efektif. Hal ini akan berdampak pada penurunan kualitas dan produktivitas jangka panjang kawasan hutan.

Perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini menyebabkan cuaca ekstrem, memperbesar resiko kebakaran hutan serta mengganggu siklus pertumbuhan tanaman hutan. Hal tersebut menyebabkan penurunan hasil produksi dan meningkatnya pengelolaan.

Dinamika lainnya karena masyarakat sekitar hutan sering kali hanya menjadi objek kebijakan tanpa dilibatkan aktif dalam pengelolaan. Faktor lainnya bisa terjadi karena rendahnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap hutan produksi dan sulitnya menjaga keberlanjutan.

Areal Penggunaan Lain (APL) (209.682,84 Ha / 63 %). Wilayah ini memiliki luas terbesar dan mencerminkan tingginya tingkat alih fungsi hutan menjadi area pertanian, perkebunan, pemukiman, dan infrastruktur. Ini menunjukkan adanya tekanan signifikan terhadap kawasan hutan yang lain, terutama terkait deforestasi.

### **Tantangan Pengelolaan Hutan di Kabupaten Jember**

Tantangan tata kelola dan regulasi untuk kawasan konservasi di Kabupaten Jember adalah terkait implementasi kebijakan seringkali kurang efektif karena lemahnya koordinasi antar instansi dan keterbatasan anggaran. Permasalahan umum yang sering terjadi yaitu penegakan hukum terhadap pelanggaran konservasi masih sangat minim.

Tantangan tata kelola dalam pengelolaan hutan lindung adalah keterbatasan anggaran, sumberdaya manusia, dan koordinasi antar instansi menyebabkan pengelolaan kawasan hutan lindung tidak optimal. Tantangan lainnya adalah pengawasan dan penegakan hukum tidak efektif dalam menekan anggaran.

Dominasi APL mengindikasikan tingginya aktivitas konversi lahan yang mengancam keberlanjutan hutan. Perluasan pertanian/perkebunan menjadi penyebab utama hilangnya tutupan hutan. Hal ini juga diperparah dengan ancaman terhadap kawasan konservasi dan hutan lindung dari aktivitas manusia, seperti perambahan liar, pembangunan infrastruktur, dan eksplorasi tidak terkendali yang merusak fungsi ekosistem.

Perbedaan proporsi luas antar fungsi kawasan hutan menunjukkan kurangnya keseimbangan dalam perencanaan tata ruang wilayah, terutama perlindungan kawasan ekologis diperburuk dengan adanya penebangan liar, perambahan, dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

### **Strategi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**

Untuk mengatasi tantangan di atas, diperlukan strategi yang holistik, antara lain dengan melakukan beberapa pendekatan. Salah satu pendekatan yang bisa dilakukan kedepannya adalah memastikan pembangunan berwawasan lingkungan. Memastikan setiap proyek infrastruktur yang direncanakan memiliki analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang ketat

(Joni, 2015). Bisa juga mendorong pembangunan yang mendukung konservasi seperti infrastruktur penunjang ekowisata dan pusat penelitian.

Pendekatan lainnya bisa melalui penguatan kerjasama multi-pihak. Kerjasama multi-pihak dengan menggandeng Perguruan Tinggi, LSM, dan pihak swasta untuk mendukung program konservasi. Dapat juga dengan cara mengoptimalkan dana hibah atau CSR untuk pendanaan program pelestarian lingkungan.

Strategi pengelolaan hutan lindung dapat dilakukan dengan penguatan program rehabilitasi hutan dengan cara melakukan reboisasi di kawasan yang rusak dengan melibatkan masyarakat melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan juga melalui pemanfaatan teknologi drone dan satelit untuk memantau kondisi hutan secara berkala.

Peningkatan kesadaran dan edukasi lingkungan juga dapat dijadikan sebagai strategi pengelolaan hutan lindung kedepannya. Melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat lokal tentang pentingnya hutan lindung untuk keberlanjutan lingkungan. Selain itu dapat juga melalui pengembangan program pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah sekitar kawasan hutan.

Strategi pengelolaan hutan lindung selanjutnya bisa melalui pengembangan ekonomi berbasis lingkungan. Pemberdayaan masyarakat sekitar melalui usaha ramah lingkungan seperti budidaya lebah madu, pengelolaan hasil hutan non kayu atau melalui ekowisata. Hal ini diharapkan mampu memberikan insentif bagi masyarakat yang berperan aktif dalam pelestarian hutan lindung.

Strategi lainnya melalui pendekatan penguatan penegakan hukum. Meningkatkan patroli dan pengawasan di kawasan hutan dengan melibatkan aparat, LSM dan masyarakat. Dapat juga dengan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku penebangan liar dan perambahan hutan.

Disamping itu bisa juga melalui pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan hutan. Penggunaan sistem informasi geografis (GIS) untuk memetakan potensi kerusakan dan mengidentifikasi area prioritas konservasi (Bashit, 2019).

Pendekatan lainnya yang tak kalah penting yaitu terkait pengelolaan bencana alam dengan membentuk tim tanggap darurat untuk menangani kebakaran hutan dan bencana lainnya, dapat juga melalui pembangunan infrastruktur mitigasi bencana seperti penahan longsor dan jalur evakuasi.

Strategi pengelolaan kawasan hutan produksi dengan pengelolaan hutan berkelanjutan dengan cara menerapkan sistem tebang pilih dan tebang tanam untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu bisa dengan cara memperkuat sertifikasi hutan berkelanjutan (FSC atau SVLK) untuk meningkatkan nilai ekonomis hasil hutan.

Melalui rehabilitasi dan reforestasi dengan melakukan penghijauan di lahan kritis dengan melibatkan masyarakat lokal. Selain itu dapat juga dengan mendorong penanaman pohon dengan siklus pertumbuhan cepat (*fast growing species*) yang sesuai dengan karakteristik wilayah Jember.

Strategi lainnya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan degradasi hutan produksi adalah dengan mengembangkan potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti rotan, madu dan tanaman obat. Dapat juga dengan mendorong kegiatan ekowisata di kawasan hutan produksi untuk meningkatkan nilai ekonomis tanpa merusak ekosistem.

Pelibatan masyarakat dalam program kemitraan hutan produksi melalui skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) ataupun melalui pemberian pelatihan dan insentif bagi masyarakat untuk mengelola hasil hutan secara berkelanjutan merupakan salah satu strategi dalam pemberdayaan dan pelibatan masyarakat sekitar.

Strategi selanjutnya berkaitan dengan adaptasi perubahan iklim adalah melalui peningkatan daya tahan kawasan hutan melalui penanaman spesies tahan terhadap cuaca ekstrem. Disamping itu bisa dengan menyusun rencana mitigasi kebakaran hutan dengan membangun sistem peringatan dini dan jalur evakuasi.

Penguatan Tata Kelola Hutan dapat dilakukan dengan melakukan revisi dan penegakan kebijakan tata ruang untuk memastikan proporsi yang lebih besar pada kawasan konservasi dan hutan lindung. Selain itu juga bisa melalui implementasi sistem zonasi untuk membatasi aktivitas manusia di kawasan yang dilindungi. Melakukan reforestasi dan rehabilitasi hutan yang rusak di kawasan lindung dan konservasi. Hal yang tidak kalah pentingnya yaitu meningkatkan peran masyarakat dalam program restorasi melalui skema agroforestri. Cara lainnya dengan mengintegrasikan masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan hutan dengan memberikan akses terhadap hasil hutan non-kayu secara berkelanjutan. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kegiatan yang mendukung konservasi, seperti ekowisata dan jasa lingkungan. Fungsi pengawasan dengan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas illegal logging dan alih fungsi lahan diharapkan mampu memberikan efek jera terhadap pelanggar. Serta hal yang sering dilupakan adalah kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan. Sedangkan hal terakhir yang bisa dilakukan kedepannya adalah mengembangkan skema pendanaan berkelanjutan, seperti pembayaran jasa lingkungan (PES) atau REDD+ untuk mendukung konservasi.

## SIMPULAN

1. Penyelesaian dinamika kawasan konservasi di Kabupaten Jember memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan aspek ekonomi, sosial dan ekologis. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta menjadi kunci untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konservasi dan kebutuhan pembangunan. Jika dilakukan secara konsisten, upaya ini dapat menjaga keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.
2. Mengatasi dinamika kawasan hutan lindung di Kabupaten Jember tahun 2024 membutuhkan pendekatan integratif yang menggabungkan aspek ekologi, sosial dan ekonomi. Melalui edukasi masyarakat, penguatan tata kelola, serta penrapan teknologi kawasan hutan lindung dapat dipulihkan dan dijaga untuk mendukung keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi semua pihak menjadi kunci keberhasilan pengelolaan ini.
3. Dinamika kawasan hutan produksi di Kabupaten Jember tahun 2024 memerlukan pendekatan pengelolaan yang berkelanjutan dan partisipatif. Dengan diversifikasi hasil hutan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi lahan, penegakan hukum yang konsisten, kawasan hutan produksi dapat mendukung kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta menjadi kunci utama keberhasilan dalam pengelolaan.
4. Data menunjukkan bahwa tekanan terhadap kawasan hutan di Kabupaten Jember cukup signifikan, terutama dari APL yang mendominasi tutupan lahan. Untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan hutan, strategi berbasis kolaborasi, penguatan hukum, serta pemberdayaan masyarakat diperlukan. Dengan demikian, kawasan hutan dapat tetap memberikan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial secara seimbang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif, A. (2016). Analisis Yuridis Pengrusakan Hutan (Deforestasi) Dan Degradasi Hutan Terhadap Lingkungan. *Jurisprudentie*, 3(Defortasi), 33–41.
- Bashit, N. (2019). Analisis Lahan Kritis Berdasarkan Kerapatan Tajuk Pohon Menggunakan Citra Sentinel 2. *Elipsoida: Jurnal Geodesi Dan Geomatika*, 2(01), 71–79. <https://doi.org/10.14710/elipsoida.2019.5019>.
- Dariono, D., Siregar, Y. I., & Nofrizal, N. (2018). Analisis Spasial Deforestasi dan Degradasi Hutan di Suaka Margasatwa Kerumutan Provinsi Riau. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 5(1), 27. <https://doi.org/10.31258/dli.5.1.p.27-33>.

- Dunggio, I., Lihawa, F., & Hasan, R. (2022). Dinamika Perubahan Tutupan Hutan Dan Lahan Di Sub Das Tamalate Kabupaten Bone Bolango. *Gorontalo Journal of Forestry Research*, 5(2), 91. <https://doi.org/10.32662/gjfr.v5i2.2451>.
- Hutan, P., Fungsinya, D., Kehidupan, B., & Mataram, U. (2023). Rizki Yuniansari. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(2). <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i2.144>.
- Joni, H. (2015). Orientasi Masyarakat Sekitar Hutan Dan Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Dalam Pelestarian Fungsi Hutan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6(1), 45–55. [www.jchunmer.wordpress.com](http://www.jchunmer.wordpress.com).
- Juniyanti, L., Prasetyo, L. B., Aprianto, D. P., Purnomo, H., & Kartodihardjo, H. (2020). Land-use/land cover change and its causes in Bengkalis Island, Riau Province (from 1990-2019). *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 10(3), 419–435. <https://doi.org/10.29244/jpsl.10.3.419-435>.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Planologi Kehutanan. 2024. <https://sigap.menlhk.go.id/>.
- Sidik, W. dan. (2020). *Definisi Hutan Umum\_Widodo*. 21(1), 30–48.
- Wahyuni, H., & Suranto, S. (2021). Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 148–162. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.10083>